

# Indikator Tingkat Hidup Pekerja/karyawan Daerah Istimewa Yogyakarta

## Agustus 2012-2013



*Membatik*

<http://lyogyakarta.bps.go.id>



Indikator Tingkat Hidup  
Pekerja/karyawan  
Daerah Istimewa Yogyakarta

**Agustus 2012 - 2013**

<http://yogyakarta.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

# Indikator Tingkat Hidup Pekerja/karyawan Daerah Istimewa Yogyakarta Agustus 2012-2013

Nomor ISBN : 978-602-1392-06-5  
Nomor Publikasi : 34.521.14.15  
Katalog BPS : 2301003.34  
Ukuran Kertas : A4 (21 cm x 29,7 cm)  
Jumlah Halaman : 36 halaman

Naskah :

Seksi Statistik Kependudukan

Bidang Statistik Sosial

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Gambar Kulit :

Seksi Statistik Kependudukan

Bidang Statistik Sosial

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

## KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Tingkat Hidup Pekerja/Karyawan Daerah Istimewa Yogyakarta Agustus 2012 - 2013 merupakan publikasi tahunan BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ke sembilan yang bertujuan memberikan gambaran tentang tingkat hidup pekerja/karyawan di Daerah Istimewa Yogyakarta keadaan tahun 2012-2013. Informasi statistik dalam publikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan dan menjadi landasan untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah rangkuman dari pengolahan beberapa data dasar hasil survei BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun data sekunder dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Indikator yang diukur meliputi keadaan pekerja/ karyawan, sektor/lapangan usaha dan pendidikan pekerja/karyawan, rata-rata upah/gaji dari pekerja/karyawan, Upah Minimum (UMP), Indeks Harga Konsumen (IHK), dan pasar tenaga kerja.

Publikasi ini diharapkan dapat melengkapi dan memenuhi kebutuhan data bagi penyusunan kebijakan pengambilan keputusan. Penghargaan dan ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak, atas perhatian dan bantuan yang diberikan sehingga publikasi ini dapat diterbitkan. Saran untuk memperbaiki publikasi indikator tingkat hidup pekerja/karyawan selanjutnya sangat diharapkan.

Yogyakarta, Oktober 2014  
Badan Pusat Statistik  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala,

**Y. Bambang Kristianto,MA**

## ABSTRAKSI

Publikasi Indikator Tingkat Hidup Pekerja/Karyawan Daerah Istimewa Yogyakarta 2012 - 2013 merupakan salah satu publikasi yang dihasilkan oleh BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Indikator tingkat hidup pekerja/karyawan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat hidup pekerja/karyawan. Indikator yang disajikan meliputi keadaan pekerja/karyawan, sektor/lapangan usaha dan pendidikan pekerja/karyawan, rata-rata upah/gaji dari pekerja/karyawan, upah minimum (UMP), indeks harga konsumen (IHK), dan pasar kerja.

Hasil Sakernas Agustus 2013 menunjukkan bahwa sekitar 47 persen penduduk yang bekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta berstatus sebagai pekerja/karyawan, baik sebagai pekerja tetap maupun pekerja bebas. Pada Agustus 2012 penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebagai pekerja/karyawan sebesar 53,7 persen dan perempuan sebesar 39,3 persen. Pada Agustus 2013 persentase laki-laki menurun 1,5 poin menjadi 52,2 persen, sedangkan perempuan meningkat 0,4 poin menjadi 39,7 persen.

Sektor S (*services*) sampai Agustus 2013 merupakan sektor yang paling dominan menyerap pekerja/karyawan yaitu sebesar 52,1 persen, meningkat dibandingkan kondisi Agustus 2012 sebesar 49,4 persen. Dilihat menurut wilayah, pekerja/karyawan yang bekerja di sektor S pada Agustus 2013 adalah sebesar 65,3 persen di daerah perkotaan dan 29,6 persen di daerah pedesaan. Sebaliknya sektor A (*Agriculture*) hanya menyerap tenaga kerja sebesar 14,0 persen di daerah perkotaan dan 52,4 persen daerah pedesaan.

Pada tahun 2013 tingkat pendidikan pekerja/karyawan di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami perubahan. Persentase tertinggi pendidikan pekerja adalah SLTP ke bawah sebesar 53,0 persen atau menurun 1,2 poin dibandingkan kondisi tahun 2012 sebesar 54,2 persen. Persentase yang berpendidikan SLTA tidak berubah yaitu 32,8 persen, sedangkan yang berpendidikan di atas SLTA pada tahun 2013 mengalami peningkatan 1,2 poin dari 13,0 persen menjadi 14,2 persen.

Dilihat secara gender masih ada perbedaan yang signifikan dalam upah/gaji, pekerja/karyawan perempuan lebih rendah dibandingkan pekerja/karyawan laki-laki. Rata-rata upah pekerja/karyawan perempuan pada Agustus 2013 sebesar Rp. 1.349.364,- sedangkan untuk laki-laki mencapai Rp. 1.654.914,- sebulan. Berdasarkan sektor/lapangan usaha upah pekerja/karyawan terendah terjadi di sektor A yaitu sebesar Rp. 673.685,-.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Abstraksi.....	iv
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar .....	vii
I. Pendahuluan.....	1
II. Sumber Data .....	9
III. Konsep dan Definisi .....	10
IV. Pekerja/Karyawan dan Penduduk yang Bekerja .....	12
V. Pekerja/Karyawan menurut Sektor/Lapangan Usaha .....	16
VI. Pekerja/Karyawan menurut Pendidikan.....	19
VII. Rata-rata Upah/Gaji Pekerja/Karyawan.....	21
VIII. Upah Minimum dan Upah Buruh di Bawah Mandor.....	24
IX. Pasar Tenaga Kerja .....	26

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama di Daerah Istimewa Yogyakarta Agustus 2012 - 2013 ....	13
Tabel 2. Persentase Pekerja Perempuan dengan Status Pekerja Keluarga/Tak Dibayar menurut Sektor di Daerah Istimewa Yogyakarta Agustus 2012 - 2013.....	14
Tabel 3. Persentase Pekerja/Karyawan menurut Sektor/Lapangan Usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta, Agustus 2012-2013 .....	17
Tabel 4. Pekerja/Karyawan menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Agustus 2012-2013 .....	19
Tabel 5. Rata-rata Upah/Gaji Sebulan menurut Sektor/Lapangan Usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta, Agustus 2012-2013 .....	21
Tabel 6. Indeks Perkembangan Upah Pekerja Produksi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, Triwulan I 2007-2013 .....	24
Tabel 7. Pasar Tenaga Kerja menurut Jenis Kelamin di Daerah Istimewa Yogyakarta, Agustus 2012-2013.....	26
Tabel 8. Tenaga Kerja Indonesia menurut Kabupaten/Kota dan Negara Tujuan Terbanyak di Daerah Istimewa Yogyakarta 2013 .....	28

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Persentase Pekerja/Karyawan menurut Sektor dan Daerah Tempat Tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta, Agustus 2012- 2013 .....	18
Gambar 2. Rata-rata Upah/Gaji Pekerja/Karyawan menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Agustus 2013.....	22
Gambar 3. Upah Minimum (UMP), UMP Riil, Indeks UMP di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2007-2013 (Ribuan rupiah) .....	25
Gambar 4. Persentase Pencari Pekerjaan yang Terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2013 .....	27





## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah proses terjadinya kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan *output* riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan *output* perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup yang diukur dengan *output* riil per orang.

Pertambahan penduduk berarti penambahan tenaga kerja serta berlakunya hukum Pertambahan Hasil yang berkurang mengakibatkan kenaikan *output* semakin kecil, penurunan produk rata-rata serta penurunan taraf hidup. Sebaliknya kenaikan jumlah barang-barang kapital, kemajuan teknologi, serta kenaikan kualitas dan keterampilan tenaga kerja cenderung mengimbangi berlakunya hukum Pertambahan Hasil yang berkurang. Penyebab rendahnya pendapatan di negara-negara sedang berkembang adalah berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang akibat penambahan penduduk sangat cepat, sementara tidak ada kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berupa penambahan kuantitas dan kualitas sumber daya alam, kapital, dan kemajuan teknologi.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Meskipun demikian, kita masih mempertanyakan apakah begitu cepatnya pertumbuhan penawaran angkatan kerja di negara-negara berkembang benar-benar akan memberikan dampak positif, atau justru negatif, terhadap pembangunan ekonomi. Sebenarnya, positif atau negatifnya penambahan penduduk bagi upaya pembangunan ekonomi sepenuhnya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga

kerja tersebut. Adapun kemampuan itu sendiri lebih lanjut dipengaruhi oleh tingkat jenis akumulasi modal dan tersedianya input atau faktor-faktor penunjang, seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi suatu negara, tetapi tenaga kerja juga dapat menjadi faktor penghambat apabila tenaga kerja yang ada mendatangkan berbagai macam masalah. Ketenagakerjaan di Indonesia masih kurang optimal dalam mendorong pembangunan ekonominya meskipun program penurunan angka pengangguran terus dicanangkan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, tingkat pengangguran di Indonesia pada Agustus 2013 meningkat menjadi 6,25 persen, dibanding Agustus 2012 sebesar 6,14 persen artinya telah terjadi peningkatan angka pengangguran sekitar 144.000 orang sepanjang periode tersebut sehingga jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 7,39 juta orang. Tantangan besar bangsa Indonesia adalah menciptakan lapangan kerja atau usaha yang layak (*decent work*) bagi tenaga kerja yang jumlahnya banyak dan cenderung terus meningkat. Tantangan itu mencakup dua aspek sekaligus yaitu penciptaan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang belum bekerja dan peningkatan produktifitas kerja bagi mereka yang sudah bekerja sehingga memperoleh imbalan kerja yang memadai untuk dapat hidup secara layak (*decent living*).

Tantangan itu jelas terlalu berat untuk dihadapi hanya oleh pemerintah. Meskipun demikian, peran yang dimainkan pemerintah dapat sangat menentukan jika dilakukan melalui pembangunan yang secara benar dan konsisten yang dirancang berbasis ketenagakerjaan, serta dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dalam kaitan ini peran pihak swasta tidak kalah pentingnya sebagaimana tercantum dalam laporan Bank Dunia (2004) berikut ini<sup>1</sup>:

Perusahaan dan wirausaha dari semua jenis usaha mikro sampai multinasional memainkan peranan kunci dalam pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan. Keputusan investasi mereka mendorong penciptaan pekerjaan, ketersediaan barang dan jasa bagi konsumen, dan keuntungan pajak pemerintah dan dapat digunakan

---

<sup>1</sup>World Development Report 2005: A Better Investment Climate for Everyone,  
[http://publications.worldbank.org/e-commerce/catalog/product?item\\_id=3043503](http://publications.worldbank.org/e-commerce/catalog/product?item_id=3043503)

untuk membiayai kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya. Sumbangan mereka sebagian besar tergantung kepada cara pemerintah dalam menciptakan iklim investasi di setiap lokasi melalui proteksi hak milik, regulasi dan pajak, strategi dalam membangun infrastruktur, intervensi dalam keuangan dan pasar kerja, dan wajah pemerintah dalam arti luas termasuk korupsi.

*Firms and entrepreneurs of all types—from micro-enterprises to multinationals play a central role in growth and poverty reduction. Their investment decisions drive job creation, the availability of goods and services for consumers, and the tax revenues governments can draw on to fund health, education, and other services. Their contribution depends largely on the way governments shape the investment climate in each location—through the protection of property rights, regulation and taxation, strategies for providing infrastructure, interventions in finance and labor markets, and broader governance features such as corruption.*

Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor-sektor pekerjaan informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian masalah industrial yang dapat memenuhi semua pihak merupakan ciri-ciri pasar kerja yang diinginkan.

Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi pula. Hal itu harus dilakukan dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia. Untuk itu pekerja harus dibekali dengan pengakuan kompetensi profesi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan global.

Visi Indonesia yang maju dan mandiri tercermin dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada pencapaian sasaran secara umum, berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang diperlihatkan oleh angka reproduksi neto (NRR) sama dengan 1 atau ekuivalen dengan

angka fertilitas total (TFR) 2,1 per satu orang perempuan usia reproduktif. Intinya, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan adalah berupa peningkatan daya saingnya. Peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan menyelenggarakan pembangunan pendidikan sehingga memiliki daya saing dalam era global. Itu dilakukan dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia secara luas dan tanpa diskriminasi.

Modal sumber daya manusia merupakan sumber penggerak pertumbuhan dan daya saing yang sangat diperlukan dalam pasar global, karenanya harus ada jaminan bahwa anak-anak atau generasi penerus akan mendapatkan pendidikan dasar dan menengah agar mendapatkan bekal pengetahuan dan keterampilan dasar yang memadai ketika mereka masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, akses terhadap pendidikan harus ditingkatkan, meningkatkan kebijakan sosial seperti beasiswa, subsidi sekolah, dan bantuan tunai bersyarat untuk memastikan anak-anak lulus SD dan SMP. Juga perlu diselenggarakan program pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.

Karena itu, perlu disediakan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau untuk semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan yang memadai. Penyediaan pelayanan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi Indonesia di masa depan, termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi dan pemberian perhatian yang lebih besar pada lapangan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan pendidikan.

Dalam konteks kualitas sumber daya manusia Indonesia, pemerintah terus berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan. Termasuk di dalam upaya itu adalah penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender di tingkat nasional dan daerah.

Penciptaan lapangan kerja dengan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, di antaranya mencakup kualitas pendidikan, kesinambungan sosial, dan lingkungan usaha yang kondusif dan berkeadilan. Penciptaan lapangan kerja di Indonesia

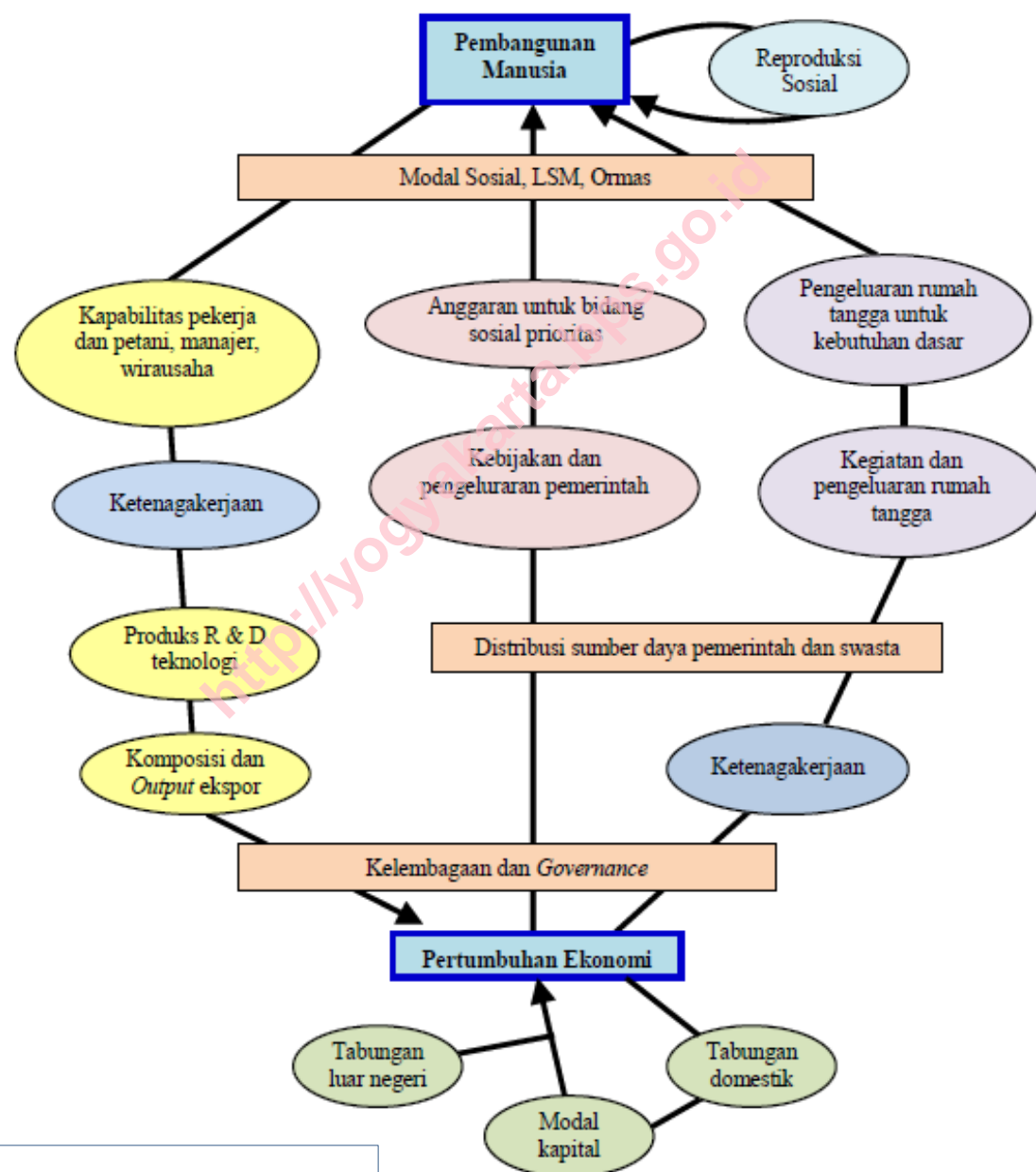
dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seperti nilai tukar mata uang, suku bunga perbankan, posisi kebijakan fiskal, inflasi, dan perdagangan. Indonesia memiliki berbagai anugerah berlimpah sebagai sumber potensial penyumbang pertumbuhan ekonomi, yakni lahan yang sangat luas, sumber daya alam, meningkatnya masyarakat kelas menengah, dan konsumsi dalam negeri yang kuat, kedekatan geografis dengan tujuan-tujuan utama ekspor, serta jumlah tenaga kerja yang besar.

Pemerintah berupaya menghilangkan berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya di Indonesia. Hambatan itu di antaranya terkait ketidakpastian lahan dan tata ruang, minimnya ketersediaan infrastruktur, birokrasi perijinan usaha, pajak dan retribusi daerah yang memberatkan, biaya-biaya ilegal, dan lainnya. Indonesia telah dikategorikan sebagai negara dengan penghasilan menengah. Oleh karenanya perusahaan diharapkan mampu untuk melakukan kapitalisasi dari tumbuhnya peluang usaha sebagai hasil meningkatnya konsumsi. Negara dan mitra sosial dapat mengambil peranan penting untuk mengembangkan program-program kewirausahaan, dan memfasilitasi, serta mendukung masyarakat untuk memulai dan mengembangkan usahanya.

Akibat guncangan eksternal krisis finansial global yang menyebabkan menurunnya permintaan atas produk-produk barang dan jasa dari Indonesia diperlukan penciptaan pekerjaan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja (padat karya) di sektor publik yang dibiayai pemerintah dan berbagai program perlindungan sosial lainnya, yang diharapkan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang rentan terhadap guncangan eksternal tersebut. Pekerjaan padat karya harus diarahkan yang bersifat produktif sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan.

Hubungan fungsional antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia dan ketenagakerjaan serta faktor-faktor lainnya diilustrasikan dalam skema yang diintrodusir oleh UNDP (1996) sebagaimana tampak dalam Bagan 1.

Bagan 1. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia dan ketenagakerjan



Sumber : UNDP 1996  
R & D : Riset & Development

Bagan 1 mengilustrasikan hubungan dua arah atau timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia. Arah ke atas menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi (diharapkan dapat) mempengaruhi besar dan pola pengeluaran rumah tangga (jalur paling kanan) dan pemerintah (jalur tengah) sebelum berdampak terhadap status pembangunan manusia. Selain itu jalur paling kanan juga menjelaskan peran krusial ketenagakerjaan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi dapat ditransformasikan menjadi kenaikan pendapatan rumah tangga. Jalur ke bawah (paling kiri) mengilustrasikan bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh terhadap struktur dan kualitas tenaga kerja dan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat.

Dampak ketenagakerjaan terhadap pendapatan rumah tangga cukup luas terhadap taraf kesejahteraan atau secara negatif terhadap kemiskinan. Kemiskinan didefinisikan sebagai deprivasi ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh pendapatan rumah tangga, karena hampir semua rumah tangga mengandalkan upah/gaji (bagi yang berstatus buruh/karyawan) atau keuntungan usaha (bagi yang berstatus berusaha). Pentingnya peranan ketenagakerjaan dalam upaya pengentasan kemiskinan digarisbawahi dalam suatu laporan akhir komisi yang dibentuk ILO yang berjudul "*A Fair Globalization: Creating Opportunities for All*"<sup>2</sup>.

Dalam salah satu seri kuliahnya pada 25 Juni 2004, Direktur Jenderal ILO saat itu, Juan Samavia, mendiskusikan butir-butir kunci laporan komisi itu: memperkuat kembali komunitas dan pasar lokal, menekankan "keadilan" (*fairness*), membuat pekerjaan layak sebagai suatu sasaran global, dan memikirkan ulang "pemerintahan global" (*global governance*). Selain itu, dia meminta komunitas internasional untuk menjadikan ketenagakerjaan sebagai suatu tujuan prioritas tinggi: ekonomi internasional, kebijakan-kebijakan perdagangan, finansial dan ketenagakerjaan harus dinilai dari dampaknya terhadap ketenagakerjaan. Menarik pelajaran dari *the World Summit for Social Dimension 1995*, Samavia meringkaskan keinginan penduduk dalam ungkapan "Berikan saya

---

<sup>2</sup> Komisi itu adalah *the World Commission on the Social Dimension of Globalization* yang dibentuk oleh ILO pada tahun 2008 dengan tugas memberikan respon terhadap kebutuhan masyarakat dalam menghadapi perubahan-perubahan tak terduga dari globalisasi.

kesempatan adil untuk memperoleh suatu pekerjaan yang layak” (“*Give me a fair chance for a decent work*”).

Perluasan dan pemerataan kesempatan kerja serta peningkatan mutu dan perlindungan tenaga kerja merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor. Dalam rangka perbaikan kesejahteraan pekerja/karyawan secara menyeluruh, kebijakan di bidang perlindungan tenaga kerja diarahkan kepada perbaikan upah, persyaratan kerja, kondisi kerja dan jaminan sosial lainnya.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk menunjang perbaikan kesejahteraan pekerja/karyawan dilakukan dengan usaha pengumpulan berbagai informasi yang berkaitan dengan keadaan tingkat hidup pekerja/karyawan dalam bentuk publikasi yang disebut Indikator Tingkat Hidup Pekerja/Karyawan. Indikator ini disusun sedemikian rupa sehingga merupakan cerminan dari Statistik Tingkat Hidup Pekerja/Karyawan.

Penyusunan indikator tingkat hidup pekerja/karyawan secara lengkap dan sesuai dengan kebutuhan perencanaan di bidang ketenagakerjaan secara menyeluruh, masih belum dapat dilakukan sampai saat ini, karena keterbatasan data yang tersedia dan beberapa faktor kualitatif yang mempengaruhi kehidupan pekerja/karyawan, masih sulit diukur dan diterjemahkan ke dalam indikator kuantitatif. Oleh karenanya publikasi ini menyajikan indikator yang masih sederhana, baik dalam bentuk maupun cakupannya.

Indikator Tingkat Hidup Pekerja/karyawan yang disajikan meliputi :

- Pekerja/karyawan dan penduduk yang bekerja.
- Pekerja/karyawan menurut sektor/lapangan usaha.
- Pekerja/karyawan menurut pendidikan.
- Rata-rata upah/gaji bersih pekerja/karyawan.
- Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Indeks Harga Konsumen (IHK).
- Pasar Tenaga Kerja.





## SUMBER DATA

Sumber data yang digunakan ini berasal dari berbagai survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, antara lain:

- Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

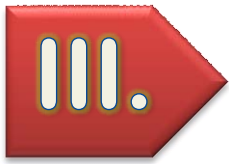
Sakernas dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Dilihat dari perkembangannya Sakernas telah mengalami beberapa perubahan, baik isi maupun periode pencacahan. Sakernas pada tahun 1986 sampai dengan 1993 dilaksanakan secara triwulanan, yaitu Triwulan I (Februari), Triwulan II (Mei), Triwulan III (Agustus) dan Triwulan IV (November). Tahun 2001-2004, Sakernas dilaksanakan sekali dalam setahun. Tahun 2005-2010 dilakukan secara semesteran, Semester I (Februari) dan Semester II (Agustus). Sejak tahun 2011 Sakernas kembali dilaksanakan secara triwulanan pada Februari, Mei, Agustus dan November untuk mendapatkan angka estimasi provinsi dan pada bulan Agustus dilakukan penambahan sampel untuk angka estimasi kabupaten/kota. Unit pencacahannya adalah rumah tangga dan mencakup seluruh wilayah Indonesia.

- Survei Upah Buruh

Survei ini dilaksanakan secara triwulanan (Januari, April, Juli dan Oktober) dengan pendekatan perusahaan. Keterangan yang dikumpulkan antara lain besarnya upah/gaji yang diterima pekerja produksi di bawah mandor.

Di samping sumber data tersebut, digunakan juga data dari publikasi BPS lainnya, seperti Indeks Harga Konsumen (IHK) dan data sekunder yang bersumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.



## KONSEP DAN DEFINISI

Batasan (*definisi*) yang berkaitan dengan konsep ketenagakerjaan, sebagai berikut:

Penduduk	Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia atau wilayah observasi selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
Penduduk usia kerja	Penduduk usia kerja yang digunakan di Indonesia adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas.
Angkatan kerja	Angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang bekerja atau mereka yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Bekerja	Kegiatan bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 (satu) jam tidak terputus dalam seminggu sebelum hari pencacahan. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.
Sementara tidak bekerja	Mereka yang mempunyai pekerjaan/usaha tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, dan lain-lain.
Lapangan usaha	Lapangan usaha/pekerjaan adalah bidang pekerjaan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2000 yang mengacu pada <i>the International Standard of Industrial Classification (ISIC)</i> .
Status pekerjaan	Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, yang terdiri atas: berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak

dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, buruh/karyawan, pekerja tidak dibayar.

Pekerja/karyawan

Pekerja/karyawan adalah mereka yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan, dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.

Pendidikan yang ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan yang diikuti oleh seseorang hingga mencapai kelas tertinggi dari tingkatan sekolah dan berakhir dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah, baik dari sekolah negeri maupun swasta.

<http://lyogyakarta.bps.go.id>

# IV.

## PEKERJA/KARYAWAN DAN PENDUDUK YANG BEKERJA

Dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh BPS, bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang dikategorikan menjadi dua kelompok kegiatan yaitu penduduk yang aktif secara ekonomi dan penduduk yang tidak aktif secara ekonomi. Penduduk yang aktif secara ekonomi disebut dengan Angkatan Kerja, dan penduduk yang tidak aktif secara ekonomi disebut Bukan Angkatan Kerja. Angkatan kerja terdiri atas penduduk usia kerja yang memiliki pekerjaan dan pengangguran, seperti penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru. Bukan Angkatan Kerja yaitu penduduk usia kerja yang tidak bekerja atau menganggur, yaitu penduduk yang sedang sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Informasi yang diperoleh dari Sakernas adalah jumlah penduduk bekerja, bersekolah, mengurus rumah tangga dan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan termasuk status pekerjaan. Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam pekerjaannya yang dikategorikan menjadi pekerja/karyawan tetap dan pekerja bebas. Penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama dikategorikan menjadi berusaha sendiri, berusaha dengan bantuan buruh tetap/tidak tetap atau anggota rumah tangga, dan pekerja tak dibayar/pekerja keluarga.

Dari kategori menurut status pekerjaan dapat diperoleh informasi keadaan dinamika pasar kerja dan tingkat pembangunan suatu daerah. Kemajuan pembangunan mengharapkan terjadinya pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan sektor jasa, peningkatan jumlah pekerja digaji/dibayar (buruh/karyawan/pegawai) serta penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian.

Pekerja/karyawan tetap adalah seseorang yang bekerja pada perusahaan/instansi atau perorangan, baik pemerintah maupun swasta, secara tetap dengan menerima upah/gaji berupa uang maupun barang. Sementara pekerja/karyawan yang memiliki

majikan tidak tetap yaitu lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir, dianggap sebagai pekerja bebas, khusus pada sektor konstruksi batasan waktunya lebih lama yaitu dalam tiga bulan terakhir. Pekerja bebas terdiri atas pekerja bebas pertanian dan pekerja bebas non pertanian.

Dengan menggunakan penimbang angka proyeksi penduduk tahun 2010-2035, dari hasil Sakernas Agustus 2012-2013 diketahui bahwa lebih dari 45 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bekerja, berstatus pekerja/karyawan baik sebagai pekerja/karyawan tetap maupun pekerja bebas. Pada Agustus 2012 persentase pekerja/karyawan sebesar 47,3 persen dan Agustus 2013 sebesar 46,6 persen, penurunan ini disebabkan oleh menurunnya persentase pekerja/karyawan laki-laki sebanyak 1,5 poin dan pekerja/karyawan perempuan bertambah sebanyak 0,4 poin. Pada Agustus 2013 dari 46,6 persen pekerja/karyawan tersebut 39,5 persen merupakan pekerja/karyawan tetap dan 7,1 persen pekerja/karyawan bebas (Tabel 1).

Tabel 1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Daerah Istimewa Yogyakarta Agustus 2012-2013

Status Pekerjaan	Agustus 2012			Agustus 2013		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	11,8	13,4	12,5	11,6	14,5	12,9
2	29,1	17,5	23,9	30,4	17,1	24,4
3	53,7	39,3	47,3	52,2	39,7	46,6
4	5,4	29,8	16,3	5,8	28,7	16,1
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.1	41,7	35,2	38,8	41,9	36,4	39,5
3.2	12,0	4,1	8,5	10,3	3,3	7,1

Sumber: Sakernas Agustus 2012-2013 *Backcasting*.

Keterangan :

1 = Berusaha sendiri ;

2 = Berusaha dibantu orang lain ;

3 = Pekerja/karyawan

(3.1 = pekerja tetap dan 3.2 = pekerja bebas) ;

4 = Pekerja keluarga/ tak dibayar ;

L = Laki-laki ; P = Perempuan

Pada Agustus 2012 dari seluruh penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan status sebagai pekerja/karyawan sebesar 53,7 persen dan pada Agustus 2013 menurun menjadi 52,2 persen, sebaliknya untuk perempuan pada periode yang sama pekerja/karyawan meningkat dari 39,3 persen menjadi 39,7 persen. Pada Agustus 2013 dari 52,2 persen pekerja/karyawan laki-laki, yang berstatus sebagai pekerja tetap sebesar 41,9 persen dan 10,23 persen sebagai pekerja bebas. Sedangkan untuk pekerja/karyawan perempuan, sebagai pekerja/karyawan tetap sebesar 36,4 persen dan 3,3 persen sebagai pekerja bebas. Pada Agustus 2012 penduduk bekerja dengan status pekerja bebas mencapai 8,5 persen dan pada Agustus 2013 menurun menjadi 7,1 persen. Pada Agustus 2012 pekerja perempuan dengan status pekerja keluarga/tak dibayar sebesar 29,8 persen dan pada Agustus 2013 menurun menjadi 28,7 persen.

Tabel 2 memperlihatkan komposisi penyerapan pekerja perempuan dengan status pekerja keluarga/tidak dibayar pada Agustus 2012 sebesar 29,8 persen dan pada Agustus 2013 menjadi 28,7 persen atau menurun 0,9 persen .

Tabel 2. Persentase Pekerja Perempuan Dengan Status Pekerja Keluarga/Tak Dibayar Menurut Sektor/Lapangan Usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta Agustus 2012-2013

Sektor	Agustus 2012	Agustus 2013
(1)	(2)	(3)
<i>Agriculture/Pertanian</i>	69,5	69,1
<i>Manufacture/Industri, Pertambangan, Kontruksi</i>	10,5	8,5
<i>Service/Perdagangan, Transportasi, Keuangan &amp; Jasa</i>	20,0	22,4
Persentase Total	100,0	100,0
Persentase Perempuan Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	29,8	28,7

Sumber: Sakernas Agustus 2012-2013 *Backcasting*.

Pada Agustus 2013 perempuan dengan status pekerja keluarga/tak dibayar di sektor perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa terjadi peningkatan penyerapan

tenaga kerja sebesar 22,4 persen dari 20,0 persen pada Agustus 2012. Selama kurun waktu 2012-2013 pada dua sektor lainnya mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja yaitu sektor pertanian dari 69,5 persen menjadi 69,1 persen dan sektor industri, pertambangan dan konstruksi dari 10,5 persen menjadi 8,5 persen, hal ini menunjukkan kondisi ketenagakerjaan perempuan dengan status pekerja keluarga/tak dibayar di Daerah Istimewa Yogyakarta banyak terserap di bidang perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa, pekerjaan di bidang perdagangan dapat dilakukan dengan membantu KRT atau ART lain berjualan makanan dan minuman jadi seperti angkringan, bakso, pecel lele atau gorengan yang banyak ditemui di Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa meninggalkan tugas pokok sebagai ibu rumah tangga dan waktu yang dipergunakan dapat menyesuaikan kondisi rumah tangga.



## PEKERJA/KARYAWAN

### MENURUT SEKTOR/LAPANGAN USAHA

Lapangan usaha/pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Pengelompokan kategori sektor/lapangan usaha dibagi menjadi tiga yaitu Sektor A atau Sektor *Agriculture* (Pertanian), Sektor M atau Sektor *Manufacture* (Pertambangan/penggalian, Industri Pengolahan, Listrik/Gas/Air, dan Konstruksi), dan Sektor S atau Sektor *Services* (Perdagangan, Transportasi, Keuangan dan Jasa-jasa).

Sektor S sampai dengan Agustus 2013 masih merupakan sektor terbesar dalam menyerap pekerja/karyawan yaitu sebesar 52,1 persen atau meningkat sebesar 0,7 poin dibanding pada Agustus 2012 yang sebesar 49,4 persen. Pada Agustus 2013 Sektor A sebesar 28,2 persen atau meningkat sebesar 0,4 poin dibanding pada Agustus 2012 yang sebesar 27,8 persen, tetapi Sektor M pada Agustus 2012 sebesar 22,8 persen menurun 3,1 poin menjadi 19,7 persen.

Pada Agustus 2013 persentase laki-laki yang terserap di Sektor M (24,2 persen) lebih besar daripada persentase perempuan (14,2 persen). Pada Sektor A persentase laki-laki yang terserap (28,8 persen) lebih rendah daripada persentase perempuan (27,6 persen) dan pada Sektor S persentase laki-laki yang terserap (48,2 persen) lebih rendah dari pada persentase perempuan (57,0 persen), seperti terlihat pada Tabel 3.

Secara umum terjadi pergeseran jumlah penyerapan tenaga kerja berdasarkan sektor selama kurun waktu 1 tahun. Sektor A dan S mengalami peningkatan sedangkan Sektor M mengalami penurunan. Sektor A mengalami peningkatan sebesar 0,4 poin jika dibandingkan dengan Sektor S, peningkatannya jauh lebih besar yaitu 2,7 poin atau 7 kali Sektor A. Hal ini sesuai dengan misi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 yang tercantum dalam RPJM 2012-2017 yaitu menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal



dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera. Peningkatan pariwisata akan diikuti oleh kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya seperti transportasi, perdagangan, akomodasi dan jasa-jasa lainnya.

Tabel 3. Persentase Pekerja/karyawan menurut sektor/lapangan usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta, Agustus 2012-2013

Lapangan usaha	Agustus 2012			Agustus 2013		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	25,7	30,4	27,8	27,6	28,8	28,2
M	28,4	15,9	22,8	24,2	14,2	19,7
S	45,9	53,7	49,4	48,2	57,0	52,1
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Sakernas Agustus 2012- 2013 *Backcasting*.

Keterangan :

A = Sektor *Agriculture* (Pertanian).

M = Sektor *Manufacture* (Pertambangan, Industri, Listrik dan Konstruksi).

S = Sektor *Services* (Perdagangan, Transportasi, Keuangan dan Jasa-jasa).

Tabel 3 menunjukkan perkembangan selama periode 2012-2013 bahwa di Sektor A persentase pekerja/karyawan laki-laki mengalami peningkatan yaitu pada Agustus 2012 sebesar 25,7 persen menjadi 27,6 persen pada Agustus 2013, sebaliknya persentase pekerja/karyawan perempuan yang bekerja pada Agustus 2013 di sektor ini sebesar 28,8 persen atau menurun dari 30,4 persen pada Agustus 2012. Pada Sektor S, persentase pekerja/karyawan laki-laki mengalami peningkatan pada Agustus 2012 sebesar 45,9 persen menjadi 48,2 persen pada Agustus 2013, dan persentase pekerja perempuan pada Sektor S juga mengalami peningkatan dari 53,7 persen pada Agustus 2012 menjadi 57,0 persen pada Agustus 2013.

Pada Agustus 2012, proporsi pekerja/karyawan yang bekerja pada Sektor S di daerah perkotaan masih sangat dominan yaitu sekitar 67,3 persen, sedangkan sumbangan pekerja/karyawan di Sektor A adalah yang terkecil, yaitu sekitar 4,7 persen. Berbeda dengan kondisi di daerah pedesaan pekerja/karyawan di Sektor S dan Sektor M mempunyai proporsi yang sama yaitu 45,5 persen. Selain Sektor S paling banyak

menyerap pekerja/karyawan di perkotaan, ternyata Sektor S daerah perkotaan relatif lebih banyak menyerap pekerja/karyawan perempuan dibandingkan pekerja/karyawan laki-laki yaitu 77,1 persen berbanding 61,1 persen.

Gambar 1. Persentase Pekerja/Karyawan menurut Sektor dan Daerah Tempat Tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta, Agustus 2012 - 2013



Sumber: Sakernas Agustus 2012- 2013 *Backcasting*.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan persentase pekerja/karyawan di Sektor A dan Sektor S, karena adanya pergeseran musim tanam/panen, perubahan iklim/cuaca dan mulai digalakkan kembali kegiatan agribisnis dan pemanfaatan lahan tidur untuk kegiatan pertanian mulai tahun 2012, yang sangat mempengaruhi pola penyerapan tenaga kerja pada Sektor A. Sementara itu Sektor M di pedesaan mengalami penurunan sebesar 4,2 poin dari 22,2 persen menjadi 18,0 persen, demikian juga di perkotaan menurun sebesar 2,4 poin dari 23,7 persen menjadi 20,7 persen pada periode Agustus 2012-2013.

# VI.

## PEKERJAKARYAWAN MENURUT PENDIDIKAN

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan pekerja/karyawan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 mengalami perubahan. Persentase pekerja berpendidikan SLTP atau lebih rendah mengalami penurunan dari 54,2 persen pada tahun 2012 menjadi 53,0 persen pada tahun 2013, sedangkan persentase pekerja/karyawan berpendidikan SLTA ke atas mengalami peningkatan dari 13,0 persen menjadi 14,2 persen. Penurunan pekerja/karyawan dengan jenjang pendidikan SLTP ke bawah dan peningkatan persentase pekerja/karyawan SLTA ke atas menunjukkan kualitas SDM Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat baik untuk pekerja/karyawan laki-laki maupun perempuan, hal ini ditunjukkan pada tabel 4.

Tabel 4. Pekerja/Karyawan menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Agustus 2012-2013

Pendidikan ditamatkan	Agustus 2012			Agustus 2013		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
s/d SLTP	49,7	59,6	54,2	48,8	58,0	53,0
SLTA	37,4	27,2	32,8	37,7	26,8	32,8
> SLTA	12,9	13,2	13,0	13,5	15,2	14,2
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Sakernas Agustus 2011- 2013 *Backcasting*.

Pekerja/karyawan laki-laki dengan latar belakang pendidikan SLTP atau lebih rendah tampak menurun dari 49,7 persen pada Agustus 2012 menjadi 48,8 persen pada Agustus 2013, demikian pula dengan pekerja/karyawan perempuan pada tingkat pendidikan yang sama mengalami penurunan dari 59,6 persen menjadi 58,0 persen. Secara keseluruhan pekerja/karyawan dengan latar belakang pendidikan sampai dengan SLTP

mengalami penurunan dari 54,2 persen menjadi 53,0 persen. Secara tidak langsung menunjukkan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun sudah berhasil ditandai dengan kesadaran masyarakat untuk menamatkan SLTP sebelum terjun ke dunia kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pekerja/karyawan dengan pendidikan satu tingkat lebih tinggi atau tamat SLTA secara umum tetap, tetapi dilihat menurut jenis kelamin seperti yang digambarkan pada Tabel 4. Persentase pekerja laki-laki berpendidikan SLTA mengalami peningkatan 0,3 poin persen (dari 37,4 persen pada Agustus 2012 menjadi 37,7 persen pada Agustus 2013) sedangkan pekerja perempuan menurun 0,4 poin persen (dari 27,2 persen pada Agustus 2012 menjadi 26,8 persen pada Agustus 2013).

Pada periode Agustus 2012 sampai Agustus 2013 persentase pekerja/karyawan laki-laki berpendidikan di atas SLTA mengalami peningkatan dari 13,2 persen menjadi 15,2 persen, demikian pula dengan persentase pekerja/karyawan perempuan pada tingkat pendidikan yang sama meningkat dari 12,9 persen menjadi 13,5 persen.

Meningkatnya persentase pekerja/karyawan berpendidikan SLTA diduga karena adanya kecenderungan lulusan SLTP dan sederajat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau bekerja di luar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekarang ini banyak perusahaan, pelaku usaha, instansi pemerintah dan swasta memberlakukan syarat pelamar kerja dengan pendidikan minimal diploma/akademi. Hal ini juga berkaitan dengan upah/gaji yang diterima, semakin tinggi tingkat pendidikan, upah/gaji yang didapat semakin besar.

# VII.

## RATA-RATA UPAH/GAJI PEKERJA/KARYAWAN

Untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pekerja/karyawan serta keluarganya, memerlukan berbagai kebijakan dalam penetapan tingkat upah/gaji pekerja/karyawan. Banyak faktor yang menentukan besarnya upah/gaji seorang pekerja/karyawan, antara lain lapangan usaha, pendidikan, jam kerja dan pengalaman kerja.

Tabel 5 menunjukkan secara keseluruhan rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan sebulan menurut sektor/lapangan usaha selama 2 tahun terakhir meningkat yaitu Rp. 1.347.577,- pada Agustus 2012 menjadi Rp. 1.537.119,- pada Agustus 2013. Rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan perempuan pada Agustus 2013 sebesar Rp. 1.349.364,- sedangkan laki-laki mencapai Rp. 1.654.914,- sebulan.

Tabel 5. Rata-Rata Upah/Gaji Sebulan menurut Sektor/Lapangan Usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta, Agustus 2012-2013

Lapangan usaha	Agustus 2012			Agustus 2013		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	995 633	421 521	743 151	819 609	384 033	673 685
M	1 045 870	803 432	990 136	1 249 284	917 923	1 171 981
S	1 760 561	1 370 266	1 588 490	1 969 640	1 492 551	1 752 682
Rata-rata	1 439 172	1 193 627	1 347 577	1 654 914	1 349 364	1 537 119

Sumber: Sakernas Agustus 2011-2013 *Backcasting*.

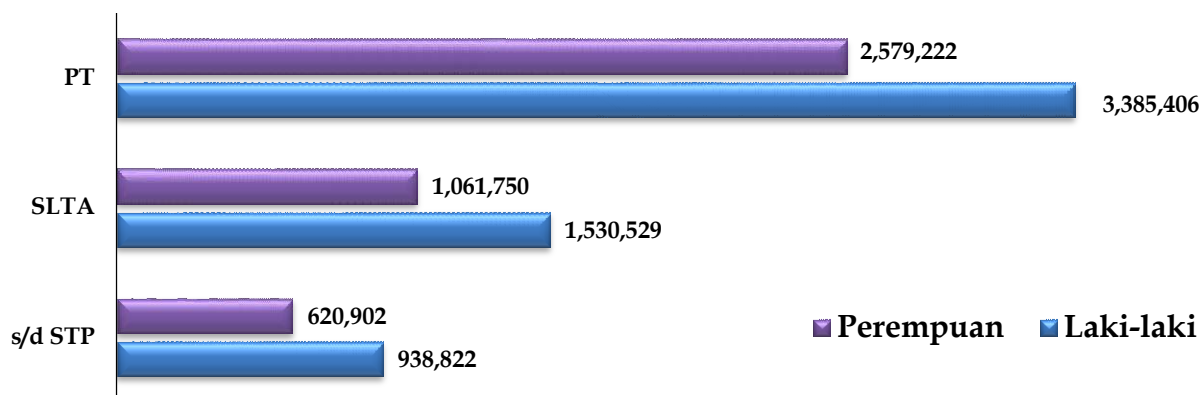
Rata-rata upah/gaji tertinggi diterima oleh pekerja/karyawan di Sektor S pada Agustus 2013 sekitar Rp. 1.752.682,-. Upah/gaji pekerja/karyawan laki-laki dan perempuan masing-masing sebesar Rp 1.969.640,- dan Rp 1.492.551,-. Pada umumnya upah/gaji pekerja/karyawan perempuan cenderung lebih rendah daripada upah/gaji pekerja laki-laki. Rata-rata upah pekerja/karyawan di Sektor A dan M berada di bawah rata-rata upah secara keseluruhan. Demikian pula jika dirinci menurut jenis kelamin.

Nampaknya ada perlakuan yang berbeda terhadap pekerja/karyawan laki-laki dan perempuan dalam penentuan tingkat upah/gaji yang diberikan. Ini diduga karena laki-laki adalah pencari nafkah utama, dan perempuan yang pada dasarnya mempunyai tugas pokok sebagai ibu rumah tangga jika terpaksa bekerja hanya sekedar membantu, sehingga tidak dapat mencurahkan tenaga/waktunya sepenuhnya. Sebagai gambaran kaum perempuan menghadapi beragam masalah dalam mengakses pendidikan dan pelatihan, dalam mendapatkan pekerjaan, dan dalam memperoleh perlakuan yang sama di tempat kerja.

Faktor lain yang dapat menentukan besarnya upah/gaji adalah tingkat pendidikan pekerja/karyawan. Para pekerja/karyawan yang hanya memiliki pendidikan SLTA ke bawah, rata-rata upah/gaji yang diterima masih sangat rendah, yaitu berada di bawah rata-rata upah/gaji dari pekerja secara keseluruhan.

Berbeda dengan pekerja dengan pendidikan yang lebih tinggi, yaitu Perguruan Tinggi, mereka mempunyai kondisi yang lebih baik. Rata-rata upah/gaji yang diterima berada di atas rata-rata keseluruhan yaitu sebesar Rp 3.385.406,- untuk pekerja/ karyawan laki-laki dan Rp 2.579.222,- untuk pekerja/karyawan perempuan. Rata-rata upah/gaji yang diterima mereka yang berpendidikan perguruan tinggi sekitar dua kali lipat rata-rata upah/gaji secara keseluruhan.

Gambar 2. Rata-Rata Upah/Gaji Pekerja/Karyawan menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Agustus 2013



Sumber: Sakernas Agustus 2013 *Backcasting*.

Kenyataan ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan pekerja/karyawan semakin tinggi pula rata-rata upah/gaji yang diterima. Dengan demikian, salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup pekerja/karyawan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum dapat dilakukan melalui pembangunan di bidang pendidikan, lebih spesifik lagi pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan kesempatan kerja. Pendidikan dapat meningkatkan produktivitas kerja seseorang, yang kemudian akan meningkatkan pendapatannya. Peningkatan pendapatan ini berpengaruh pula kepada pendapatan nasional negara yang bersangkutan, untuk kemudian akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu pendidikan sebagai alat untuk menyiapkan tenaga kerja terdidik dan terlatih yang sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Korelasi antara pendidikan dengan pendapatan tampak lebih signifikan di negara yang sedang berkembang.

# VIII.

## UPAH MINIMUM DAN UPAH BURUH DI BAWAH MANDOR

Perkembangan upah/gaji yang diperoleh bagi pekerja/karyawan tetap (bekerja hanya kepada satu majikan secara tetap selama sebulan terakhir) digambarkan oleh hasil Survei Upah dengan pendekatan perusahaan. Tujuan survei ini adalah mengumpulkan data upah secara berkala bagi buruh yang berstatus di bawah mandor atau supervisor. Oleh karena buruh dengan status ini merupakan pekerja kelas strata terendah yang merupakan mayoritas pekerja maka diharapkan dapat menggambarkan taraf kesejahteraan pekerja pada strata tersebut.

Tabel 6 memperlihatkan perkembangan rata-rata upah per bulan buruh di bawah mandor pekerja produksi dan juga menunjukkan bahwa upah nominal meningkat selama kurun waktu 2007-2013, demikian pula perkembangan rata-rata upah secara riil, indeks harga konsumen, atau indeks Upah Minimum Provinsi (UMP) juga meningkat.

Tabel 6. Indeks Perkembangan Upah Pekerja Produksi Sektor Manufaktur di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, Triwulan I Tahun 2007-2013

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Upah Nominal (Ribu Rp)	725,0	780,3	828,3	870,8	949,2	1 021,3	1 129,1
Upah Riil (Ribu Rp)	725,0	737,5	733,0	744,3	763,7	793,1	827,5
Upah Minimum Propinsi/ UMP (Ribu Rp)	500	586	700	745,7	808	892,7	947,1
Indeks Upah Nominal (2007=100)	100,0	112,2	112,3	117,7	130,9	140,9	155,7
Indeks Upah Riil (2007=100)	100,0	101,7	101,2	102,7	105,3	109,4	114,1
Indeks Harga Konsumen (IHK2007=100)	100,0	105,8	113,0	117,0	124,3	128,8	136,4
Indeks UMP (2007=100)	100,0	117,1	140,0	149,1	161,6	178,5	189,4

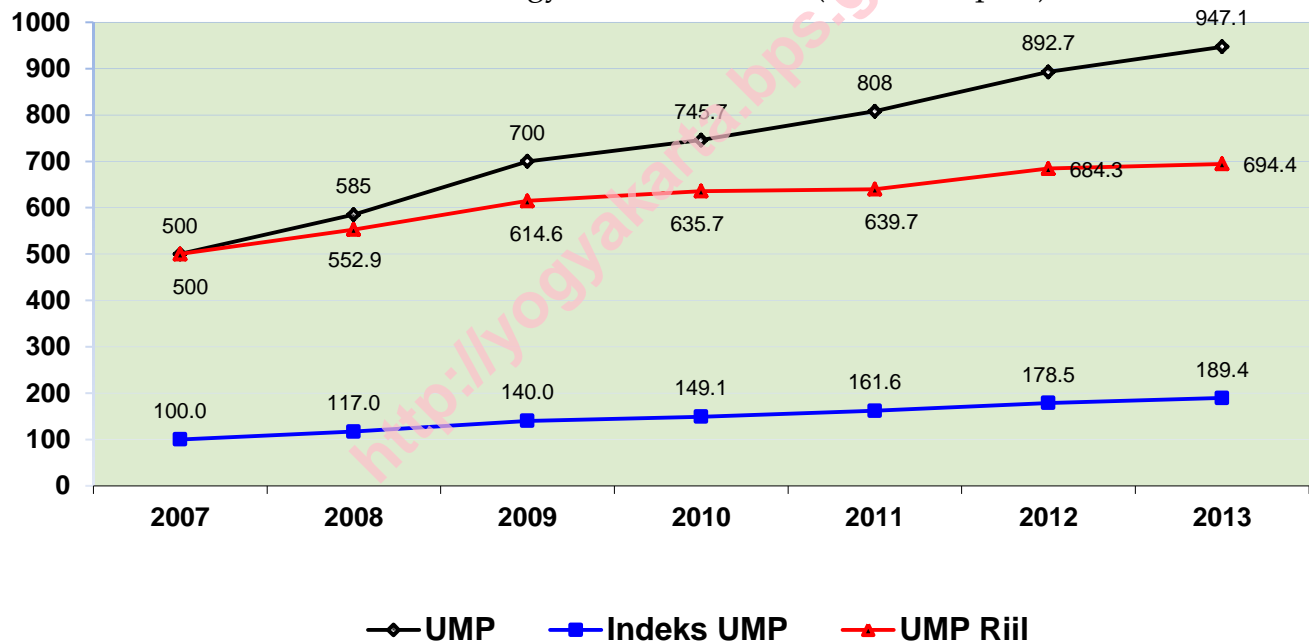
Sumber: Survei Upah 2007-2013.



Sejak tahun 2007 Upah Minimum Provinsi (UMP) secara nominal mengalami lonjakan yang berarti dan bergerak naik hingga tahun 2013. Indeks perkembangan UMP pada tahun 2013 menunjukkan angka yang tertinggi bila dibandingkan dengan indeks perkembangan upah pekerja maupun IHK selama periode 2007 sampai dengan 2013.

Gambar 3 menunjukkan Perkembangan UMP di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2007 sampai dengan 2013, tampak bahwa UMP cenderung terus meningkat dalam enam tahun terakhir, peningkatan UMP ini terjadi baik secara nominal maupun riil.

Gambar 3. Upah Minimum Provinsi (UMP), UMP Riil, dan Indeks UMP di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2007-2013 (Ribuan Rupiah)



Sumber: Survei Upah 2007-2013

## IX. PASAR TENAGA KERJA

Penyebaran tenaga kerja yang tidak merata menyebabkan kurang optimalnya penggunaan sumber daya alam dan manusia. Untuk mengatasi ketidakmerataan tersebut dilakukan usaha-usaha, antara lain melalui penyaluran dan pemanfaatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKL) serta penyaluran dan pemanfaatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN).

Data pendaftaran pencari kerja, lowongan kerja (permintaan), dan penempatan kerja (pemenuhan) diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengumpulan data pasar tenaga kerja ini adalah berdasarkan pelaporan sehingga mungkin belum dapat menggambarkan sepenuhnya keadaan pasar tenaga kerja dan hanya digunakan sebagai gambaran kasar saja.

Tabel 7. Pasar Tenaga Kerja menurut Jenis Kelamin di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012-2013

Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Pencari kerja</b>			
2012	45 637	41 904	87 541
2013	44 398	45 020	89 418
<b>Lowongan kerja</b>			
2012	10 862	9 740	20 602
2013	8 630	5 851	14 481
<b>Penempatan/penghapusan</b>			
2012	17 710	14 700	32 410
2013	12 174	11 419	23 593

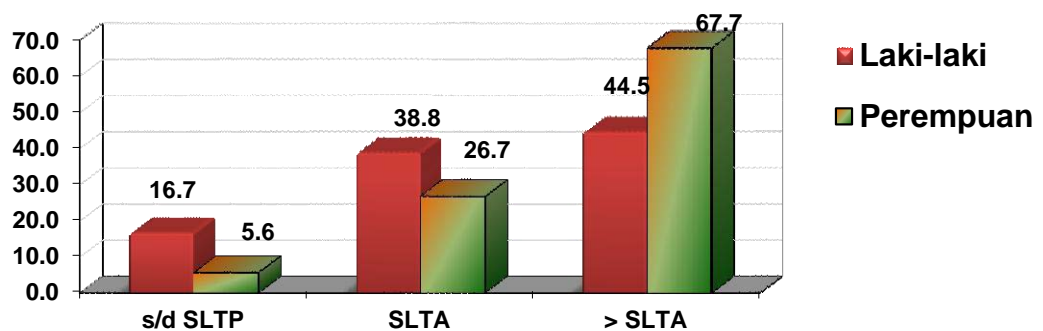
Sumber : Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2014

Tabel 7 memperlihatkan perbandingan antara pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap lowongan kerja dan penempatan kerja pada tahun 2013 untuk laki-laki adalah 100:19:27. Ini berarti bahwa

pada tahun 2013 dari setiap 100 orang pencari kerja laki-laki di Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya terdapat lowongan kerja untuk laki-laki sekitar 19 orang dan terdapat 27 orang laki-laki yang berhasil ditempatkan bekerja baik di Daerah Istimewa Yogyakarta atau di daerah lain. Sementara untuk perempuan perbandingannya adalah 100:13:25. Dari perbandingan tersebut tampak bahwa peluang pencari kerja laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan untuk memperoleh pekerjaan. Dari seratus pencari kerja laki-laki yang mendapatkan penempatan kerja sebanyak 27 persen, lebih tinggi daripada penempatan kerja untuk yang perempuan sebanyak 25 persen dan sebagian besar penempatan kerja berada di luar daerah. Tidak terpenuhinya seluruh lowongan kerja tersebut karena adanya berbagai hal, antara lain kualifikasi pencari kerja yang tidak sesuai dengan persyaratan yang diminta, atau sebaliknya, pencari kerja belum merasa cocok dengan lowongan yang tersedia meskipun sebenarnya persyaratannya dapat dipenuhi.

Tingkat pendidikan tenaga kerja dapat digunakan untuk mengukur tingkat keahlian tenaga kerja. Tingkat keahlian tenaga kerja merupakan faktor penentu kemampuan suatu daerah untuk bersaing dengan sukses di pasar tenaga kerja dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi. Persentase pencari pekerjaan yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut pendidikan dan jenis kelamin pada tahun 2013 tampak dominan pada pendidikan SLTA dan SLTA ke atas (Gambar 4.)

Gambar 4. Persentase Pencari Pekerjaan yang Terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2013



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

Persentase pencari pekerjaan antara laki-laki dan perempuan dengan tingkat pendidikan kurang dari SLTP adalah 16,7 persen dan 5,6 persen, sedangkan pencari pekerjaan laki-laki sebanyak 38,8 persen dengan pendidikan SLTA lebih tinggi dibanding pencari pekerjaan perempuan sebanyak 26,7 persen. Ada berbagai kemungkinan pencari pekerjaan laki-laki pada tingkat pendidikan kurang dari SLTP lebih banyak daripada pencari pekerjaan perempuan antara lain tanggung jawab anak laki-laki dalam rumah tangga, ingin lebih cepat mandiri dan mencari penghidupan yang lebih baik.

Sebaliknya pencari pekerjaan perempuan lebih tinggi persentasenya dibanding pencari pekerjaan laki-laki pada tingkat pendidikan SLTA ke atas yaitu sebesar 67,7 persen dan 44,5 persen. Kondisi ini kemungkinan berkaitan dengan jenjang pendidikan sebelumnya, perempuan ternyata lebih banyak yang melanjutkan pendidikan setelah SLTA. Dengan pendidikan lebih tinggi diharapkan mendapat pekerjaan yang lebih baik, sesuai dengan keinginan dan upah/gaji yang lebih tinggi.

Tabel 8. Tenaga Kerja Indonesia menurut Kabupaten/Kota dan Negara Tujuan Terbanyak di Daerah Istimewa Yogyakarta 2013

Kab/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Negara Tujuan Terbanyak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	89	219	308	Malaysia
Bantul	104	235	339	Malaysia
Gunungkidul	20	47	67	Malaysia
Sleman	74	120	194	Malaysia
Yogyakarta	52	23	75	Amerika Serikat
Daerah Istimewa Yogyakarta	339	644	983	Malaysia

Sumber : Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2014

Untuk mendapatkan kesempatan kerja, memenuhi kebutuhan hidup dan menggapai cita-cita calon tenaga kerja terpaksa menerima kesempatan kerja di luar daerah atau bahkan di luar negeri. Pada tahun 2013 berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah tenaga kerja Daerah Istimewa Yogyakarta yang bekerja di luar negeri mencapai 339 orang untuk laki-laki dan 644 orang untuk perempuan. Jumlah tenaga kerja perempuan di luar negeri hampir 2 kali lipat tenaga kerja laki-laki, hal ini menunjukkan kesempatan kerja perempuan di luar negeri lebih besar meskipun kebanyakan hanya sebagai tenaga kerumahtanggaan. Pekerja perempuan di luar negeri menurut asal dan jumlah terbanyak adalah dari Kabupaten Bantul yaitu sebesar 235 orang, diikuti Kabupaten Kulonprogo sebanyak 219 orang, Kabupaten Sleman 120 orang, Kabupaten Gunungkidul 47 orang dan Kota Yogyakarta 23 orang. Pekerja laki-laki di luar negeri menurut asal dan jumlah, urutannya adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dari Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul. Jika dilihat menurut negara tujuan, sebagian besar pekerja (81,79 persen) bekerja di Malaysia, sisanya tersebar di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Singapura, Taiwan, Uni Emirat Arab, Perancis, Oman, dan Qatar.

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://yogyakarta.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta 55183

Telp.(0274) 4342234 (Hunting) Fax. 4342230

Email : [bps3400@mailhost.bps.go.id](mailto:bps3400@mailhost.bps.go.id)

Homepage:<http://yogyakarta.bps.go.id>